

## IMPLEMENTASI SAK ETAP DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM TERKAIT AKSES MODAL PERBANKAN

Teti Rahmawati<sup>1)</sup>, Oktaviani Rita Puspasari<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan  
tetirahmawati170681@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan  
oktavianipuspasari@gmail.com

### **Abstract**

*The aim of this research is analyze further about the quality of finance statement UMKM, the readiness of UMKM in implementing SAK ETAP when compiling the finance statement, and assess the impact of SAK ETAP implementation when UMKM is compiling the finance statement. This research method is explanatory survey that comes from primary data. Data collection techniques through questionnaire and direct interview. UMKM in Kuningan regency has not been ready to implement SAK ETAP in compiling the finance statement because mostly the businessman have not understood SAK ETAP yet. Business measurement, term of business establishment, socialization and training of SAK ETAP, education background and also the last owner education grade influence toward the perceive of business man which is related with the significance of accountancy process to UMKM. Business measurement, term of business establishment, socialization and training of SAK ETAP, education background and the owner education grade, also management professionalism influence toward the doer's comprehension of UMKM which is related with implementation of SAK ETAP. The impact of implementation SAK ETAP indicated that finance statement quality influence toward the ease of banking capital access.*

**Keywords:** UMKM; SAK ETAP; Finance statement quality; Banking access

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas laporan keuangan UMKM, kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP pada saat penyusunan laporan keuangan dan menilai dampak dari pengimplementasian SAK ETAP ketika UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan menyusun laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey yang bersumber pada data primer. Teknik Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara langsung. UMKM di Kabupaten Kuningan belum siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami SAK ETAP. Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan serta jenjang pendidikan terakhir dari pemilik berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP. Dampak dari implementasi SAK ETAP memberikan indikasi kuat bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap besarnya kemudahan akses modal perbankan.*

**Kata Kunci:** UMKM; SAK ETAP; Kualitas laporan keuangan; Akses perbankan

*Cronicle of Article :Received (April,2017); Revised (Mei,2017); and Published (Juni, 2017).*

©2017 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

**Profile and corresponding author:** Teti Rahmawati SE., M.Si<sup>1)</sup> dan Oktaviani Rita Puspasari SE., M.Si<sup>2)</sup> adalah dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. *Corresponding Author:* tetirahmawati170681@gmail.com<sup>1)</sup> dan oktavianipuspasari@gmail.com<sup>2)</sup>.

**How to cite this article:** Teti Rahmawati, O. R. P. (2017). Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 49–62. Retrieved from <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan UMKM merupakan jenis usaha yang terbukti mampu memberikan kontribusi serta peran yang nyata pada sektor perekonomian. UMKM bahkan dianggap sebagai tulang punggung pada perekonomian di Indonesia, karakteristiknya yang kuat, dinamis, dan efisien mampu mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Pemanfaatan UMKM terbukti mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, karena UMKM biasanya bergerak dalam sektor industri lokal dan tidak bergantung pada impor, dengan hasil yang beragam dan unik sehingga mampu bersaing di pasar ekspor. Perekonomian Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya dalam memiliki fundamental yang kuat, apabila koperasi dan UMKM dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional yang produktif serta memiliki daya saing (Alhusain, 2014). Data dari Kementerian KUKM Indonesia pada Tuti & Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 56% utk PDB, dengan jumlah UKM yang mencapai 56,6 juta serta 99,8% dari UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2013. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian juga terjadi di banyak Negara, seperti yang dikutip dari Baas dan Schrooten (2006) menyatakan bahwa jumlah UKM di Negara maju mencapai 90% dari keseluruhan usaha serta mampu menyerap tenaga kerja 2/3 dari jumlah pengangguran yang terdapat di negara-negara tersebut. Kelebihan lain dari UMKM adalah dalam menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif, sehingga menciptakan produk-produk yang lebih bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Selain itu, peran strategis dari UMKM sebagai alternatif pengamanan masyarakat terhadap ancaman krisis dan turbulensi ekonomi (Probosari, 2014). Dibuktikan dengan keberhasilan sektor usaha kecil dan menengah dalam bertahan serta mendinamiskan kondisi

perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997.

Pencapaian serta besarnya potensi UMKM ternyata tidak lantas menyebabkan UMKM mampu bergerak mengembangkan diri dengan pesat produk-produknya kepada masyarakat. Keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses sumber permodalan merupakan kesulitan utama yang dialami UMKM.

Usaha yang dikembangkan UMKM hanya sebatas tingkat modal yang dimiliki saja. Hal ini terjadi karena UMKM cenderung hanya menggunakan modal yang berasal dari diri sendiri maupun pemilik dan perputaran atas hasil usaha yang diperoleh (Alhusain, 2014). Hal tersebut ironi dengan program pemerintah serta pihak perbankan yang banyak memberikan fasilitas bantuan permodalan khususnya bagi kredit usaha kecil, seperti misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dicanangkan oleh pemerintah dalam membantu usaha kecil terkait permodalan. Kebanyakan para pelaku UMKM merasa usaha yang digeluti adalah usaha kecil yang dijalankan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga adanya pinjaman terhadap bank hanya akan menjadi beban. Persyaratan yang rumit oleh pihak pemberi kredit dirasa sangat memberatkan para pelaku UMKM. Program pembiayaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan UMKM, baik yang dijalankan oleh pemerintah melalui Kementerian KUKM maupun melalui pihak perbankan. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang dikerjasamakan dengan beberapa bank pemerintah. KUR sendiri dimaksudkan untuk memberi pembiayaan modal yang efektif untuk UMKM dana menjadi jalan keluar untuk membantu mempermudah akses permodalan (Osa, 2010 pada Rudiantoro dan Siregar, 2011). Akan tetapi sayangnya program KUR tidak memenuhi target dan kurang termanfaatkan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi yang memadai berupa laporan keuangan yang dihasilkan

oleh UMKM, sehingga perbankan sebagai penyalur KUR dalam menyalurkan kreditnya cenderung lebih berhati-hati. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memberikan informasi akuntansi yang memadai, sehingga informasi terasa begitu mahal bagi pihak perbankan (Baas dan Schrooten, 2006). Informasi diperoleh apabila para pelaku UMKM dapat memberikan rincian informasi mengenai keadaan usaha UMKM yang tercermin pada laporan keuangannya. Pemerintah Indonesia melalui PP No 17 Tahun 2013 menyatakan tentang adanya kewajiban bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi (Tuti dan Dwijayanti, 2014). Akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut tidak serta merta membuat pelaku UMKM membuat pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai. Hal ini mendorong Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk menerbitkan dan mensyahkan suatu standar yaitu Standar Akuntansi untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Standar ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM agar dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dimana laporan tersebut dapat diaudit dan mendapat opini atas audit yang dilakukan. Implementasi standar PSAK-IFRS dalam penyusunan laporan keuangan UMKM dirasa sangat berat sebelum adanya standar tersebut. Adanya keringanan dalam menyusun laporan keuangan dengan diterbitkannya SAK ETAP memungkinkan untuk dapat diterapkan UMKM sehingga menambah keterpercayaan dari beberapa pihak eksternal pengguna laporan keuangan seperti pemasok, investor, dan perbankan terkait dengan adanya kemudahan akses kredit atau pembiayaan sebagai tambahan permodalan UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan yang terdapat pada UMKM dan bagaimana kesiapan UMKM dalam implementasi SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan terkait dengan kemudahan akses permodalan dari perbankan di Kabupaten Kuningan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sendiri merupakan produk yang dihasilkan dari proses akuntansi, menurut Warren et al. (2014) adalah laporan yang disediakan oleh sistem informasi untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas bagi UMKM akan dapat dihasilkan apabila dalam proses penyusunan maupun proses akuntansi yang dilakukan disesuaikan dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri sebelum diberlakukannya SAK ETAP, standar yang diterapkan untuk dijadikan pedoman dalam proses akuntansi entitas usaha adalah PSAK. Karena PSAK yang masih bersifat terlalu umum bagi kriteria entitas bisnis, diterbitkanlah SAK ETAP. Dalam pelaksanaannya entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik masih dapat memilih standar mana yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya, bisa menggunakan SAK ETAP ataupun PSAK umum. Apabila entitas usaha tanpa akuntabilitas publik telah memilih untuk menggunakan PSAK Umum, maka setelahnya entitas usaha tersebut tidak boleh melakukan revisi atas kebijakan akuntansi dengan menggunakan SAK ETAP (Narsa, et al. 2012).

Narsa et al. (2012) menyatakan kriteria entitas tanpa akuntabilitas publik sendiri dikembangkan dengan membandingkannya dengan yang dimaksud entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu: *pertama*, entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal dan *kedua*, entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

### Permodalan Perbankan

Faktor produksi yang paling utama diperlukan dalam proses produksi adalah

modal, yang merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Modal merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dengan uang. Modal dalam suatu perusahaan dikelola dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, antara lain: (1) pembelian tanah dan bangunan; (2) pembelian persediaan bahan; (3) pembelian mesin dan peralatan; dan (4) sisanya disimpan dalam bentuk uang tunai/*cash* (Budiwati dalam Alhusain, 2014).

Modal kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi unit usaha karena berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan, ketersediaan modal dalam proses produksi dan terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha, produksi yang optimal dapat diperoleh dengan adanya modal yang cukup akan bahkan peningkatan produksi yang lebih besar akan dapat dilakukan dengan penambahan porsi modalnya. Peningkatan produksi yang dilakukan oleh suatu unit usaha akan menjadikan semakin besar perkembangan usaha tersebut yang dapat berdampak pula pada perluasan pangsa pasar.

Dengan tersedianya modal maka aktivitas usaha akan berjalan lancar sehingga, atau dapat dikatakan pengembangan modal sendiri terjadi melalui suatu proses kegiatan usaha. Sumber modal yang digunakan oleh perusahaan dapat diperoleh dari modal milik sendiri dari pemilik seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal asing. Modal asing sendiri dapat diperoleh dari investor maupun pinjaman dari pihak lain (bank).

### **Pengembangan Hipotesis**

Pelaku UMKM umumnya menjalankan usaha dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tercukupinya kebutuhan dianggap suatu keberhasilan usaha. Oleh karena itu, banyak diantara mereka yang enggan untuk melakukan pembukuan atas transaksi keuangan yang

dilakukan. Bahkan masih banyak pelaku UMKM yang cenderung menjalankan usaha untuk pemenuhan kebutuhan dan menghindari hutang karena dirasa akan membebani mereka. Perlunya identifikasi terhadap UMKM yang masih tidak melakukan pembukuan sama sekali atau melakukan pencatatan hanya sebatas transaksi sederhana usaha perlu dilakukan. Berdasarkan penelitian Pinasti (2001) diperoleh informasi bahwa para pelaku usaha di wilayah Banyumas tidak menyediakan informasi akuntansi dalam mengelola usaha. Pelaku usaha hanya mengandalkan hasil pantauan situasi pasar dalam mengelola usahanya, faktor laba adalah urusan yang utama dan pencatatan hanya dianggap sebagai hal yang merepotkan tanpa manfaat. Pandangan ini tentu merugikan pengusaha UMKM, karena bantuan permodalan untuk pengembangan usaha lebih sulit diperoleh jika tidak ada informasi akuntansi yang disajikan yang menggambarkan kondisi keuangan usaha.

Cara pandang pelaku UMKM tentang pentingnya proses akuntansi perlu untuk diarahkan agar mereka lebih peduli dan paham atas manfaat lebih yang akan diperoleh dengan melakukan aktivitas akuntansi serta peningkatan kualitas dalam pelaporan keuangan atas unit usaha mereka. Said (2009) dalam Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi yang terbatas, kerumitan, serta persepsi bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting menyebabkan UMKM masih saja belum melakukan proses akuntansi.

Semakin lama suatu usaha berdiri yang diharapkan semakin lama suatu usaha berdiri semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya proses akuntansi pada unit usahanya. Demikian semakin lama perusahaan berdiri akan lebih meningkatkan pemahaman pelaku usaha untuk mengimplementasikan SAK ETAP dengan tepat. Keinginan dalam pengimplementasian SAK ETAP juga seharusnya akan lebih dirasakan pada unit usaha yang lebih lama

berdiri, karena pengalaman yang diperoleh tentang kebutuhan penerapan standar yang tepat sebagai acuan dalam menghasilkan laporan yang berkualitas.

Ukuran usaha akan dapat mempengaruhi pola pikir pelaku usaha dalam mempertimbangkan kebijakan untuk melakukan proses akuntansi. Semakin besar ukuran usaha seharusnya semakin tinggi minat pelaku usaha dalam melakukan proses akuntansi, hal tersebut berkaitan dengan akses permodalan serta perluasan usaha, sejalan dengan Rudiantoro & Siregar (2011) bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terhadap proses akuntansi.

Pemerintah banyak memberikan bantuan terkait pengembangan UMKM serta prospek peningkatan UMKM dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan, serta bantuan materiil yang nyata dalam peningkatan modal UMKM dalam hal ini contohnya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada beberapa bank yang ditunjuk. Institusi keuangan formal atau dalam hal ini perbankan tidak akan begitu saja memberi bantuan permodalan, mereka akan membutuhkan informasi terkait prospek usaha kedepan terkait pemenuhan kewajibannya nanti. Informasi yang dimaksud adalah laporan keuangan yang menjelaskan kondisi keuangan serta prospek usaha kedepan dari UMKM sendiri. Sosialisasi diberikan juga mengenai bagaimana pengelolaan catatan keuangan yang baik dan pembukuan harus dilakukan secara rutin.

Sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Murniati (2002) yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha dalam memberikan pelaporan keuangan yang lebih memadai. Latar belakang pendidikan dari pelaku usaha yang dimaksud adalah *basic* pendidikan mereka yang berasal dari akuntansi atau minimal ekonomi, mereka cenderung lebih merasa perlu dan pentingnya melakukan pengelolaan yang baik terhadap keuangan

dan pengelolaan akuntansi yang tepat agar perkembangan unit usaha dapat dengan mudah terpantau. Akan sama ketika dikaitkan dengan pemahaman pelaku usaha tentang cara mereka melakukan implementasi SAK ETAP. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan mereka dalam memahami serta mengimplementasikan SAK ETAP akan lebih baik.

Latar belakang pendidikan tidak hanya diperoleh dari jalur formal, namun bisa juga berasal dari pengetahuan dari jalur informal yaitu sosialisasi dan pelatihan khususnya terkait penyusunan laporan dan proses akuntansi yang diperlukan bagi UMKM yaitu SAK ETAP. Tanpa memerlukan kesesuaian serta jenjang dari pendidikan formal, dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang cukup tentang standar pelaporan keuangan dan proses akuntansi seharusnya akan meningkatkan persepsi pelaku usaha untuk melakukan proses akuntansi dan implementasi SAK ETAP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Profesionalisme manajemen berkaitan dengan kinerja dari manajemen yang bertindak secara professional, dengan mengutamakan tujuan kinerja terbaik dari unit usaha. Professional dalam hal ini berkaitan bagaimana manajemen atau pelaku usaha mampu mengelola dengan baik usahanya, membuat kebijakan-kebijakan serta mengatur jalannya unit usaha dengan baik. Termasuk didalamnya adalah dalam pengelolaan keuangan dan aktivitas-aktivitas ekonomi entitas, seperti dalam melakukan pemisahan yang tegas terhadap aset entitas dan aset pribadi pemilik. Mempekerjakan staf khusus yang ditunjuk dalam mengelola transaksi-transaksi keuangan atau tepatnya staf khusus akuntansi juga sebagai salah satu tindakan professional dari manajemen. Dengan pengelolaan atau manajemen yang tepat serta professional dalam menjalankan suatu unit usaha cenderung akan

mempengaruhi pemahaman pelaku usaha dalam mengimplementasikan SAK ETAP.

Berdasarkan pertimbangan di atas dirumuskan hipotesis penelitian yaitu **Pertama**, ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. **Kedua**, lama usaha berdiri berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. **Ketiga**, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. **Keempat**, latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. **Kelima**, jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. **Keenam**, ukuran usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP. **Ketujuh**, lama usaha berdiri berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP. **Kedelapan**, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP. **Kesembilan**, latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP. **Kesepuluh**, jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP. **Kesebelas**, profesionalisme manajemen berpengaruh positif terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP.

Kebanyakan UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal pinjaman dari bank, dimana salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya informasi yang diperoleh oleh pihak perbankan terkait dengan kondisi ekonomi dan kapasitas UMKM terkait kebutuhan permodalan yang diajukan (Baas & Schrooten, 2006). Bornheim dan Herbeck

(1996) dalam Rudiyanto dan Siregar (2011) menyatakan bahwa hubungan antara pengusaha UMKM dan perbankan dipengaruhi oleh: ketersediaan informasi tentang profil bisnis debitur, persaingan dunia perbankan, sedangkan dari sisi UMKM yang berkaitan dengan sisi perbankan adalah besarnya agunan, akses kredit permodalan, *cost of capital* atau biaya bunga atas pinjaman modal yang diberikan.

Ketersediaan informasi yang memadai dari pelaku UMKM akan memudahkan mereka dalam mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Cziraky, Tisma, & Pisarovic (2005) dalam Rudiyanto dan Siregar (2011) mengatakan bahwa rendahnya tingkat penyaluran kredit UMKM disebabkan kurangnya informasi bank atas penilaian kelayakan kredit dari debitur sendiri dalam hal ini adalah UMKM. Diperkuat dengan Baas & Schrooten (2006) yang mengungkapkan bahwa tehnik pemberian kredit yang sering digunakan adalah *financial statement lending* dimana dasar pemberian kredit adalah berdasarkan informasi keuangan dari debitur.

Permasalahan utama dari UKM terkait dengan manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan keahlian tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan dan lainnya. Sehingga untuk mengatasi masalah manajemen keuangan serta kredit, mulai banyak dari UMKM yang memperhatikan proses pembukuan dan pelaporan keuangan (Basri & Nugroho, 2009 pada Rudiantoro & Siregar, 2011).

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hal mutlak yang harus dijaga dan ditunjukkan oleh UMKM dalam melakukan permohonan bantuan permodalan terhadap lembaga keuangan formal atau perbankan pada umumnya. Laporan keuangan yang lengkap serta memberikan gambaran yang jelas atas kondisi keuangan dan usaha dari entitas akan dapat mempermudah perbankan dalam melakukan analisa terhadap kelayakan kredit yang akan diberikan. Penyebab dari kebanyakan permasalahan UMKM mengalami kesulitan

dalam permohonan kredit perbankan di seluruh dunia adalah karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh UMKM yang bersifat *hard information* dibandingkan dengan kualitas yang sesuai dengan standar perbankan. Rendahnya kualitas laporan keuangan menjadikan pihak perbankan mengalami kesulitan untuk mengandalkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut (Baas & Schrooten, 2006). Rendahnya kualitas laporan keuangan biasanya disebabkan juga karena UMKM cenderung melakukan pencatatan hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada aktivitas usaha, tanpa melakukan pemisahan pada masing-masing transaksi. Banyak juga diantaranya yang bahkan masih mencampur keuangan yang dimiliki pemilik usaha dengan dana yang digunakan dan diperoleh dari kegiatan entitas usaha. Hal tersebut berlawanan dengan prinsip akuntansi yaitu konsep entitas bisnis yang menyatakan bahwa bisnis merupakan entitas yang terpisah dari pemilik, kreditur, maupun pihak pemangku kepentingan lain (Warren, *et al.* 2014). Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis penelitian kedua belas yaitu kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dengan mengimplementasikan SAK ETAP berpengaruh positif bagi kemudahan dalam akses permodalan dari perbankan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory survey* yang bersumber pada data primer. Penelitian *explanatory* adalah penelitian untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha mendapatkan jawabannya (verifikatif) hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun & Effendi, 1995). Dengan teknik pengumpulan data melalui menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung pertanyaan mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang ada di UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP di wilayah Kabupaten Kuningan dan

melalui wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai pengelolaan transaksi keuangan serta prospek implementasi SAK ETAP di Wilayah Kabupaten Kuningan.

## Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kuningan yang sudah memiliki ijin (legal) berdasarkan data pada dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan sampai tahun 2015 UMKM yang terdiri dari UKM jenis industri, usaha perdagangan dan jasa. Sampel yang diambil dari populasi yang ada dilakukan secara *Simple Random* (acak), dengan menggunakan tingkat kesalahan 5% dari daftar pengambilan sampel yang dianggap representatif menurut Isaac & Michael (Sugiyono, 2011).

Pengambilan sampel dalam penelitian ini yang dianggap representatif adalah UMKM di Kabupaten Kuningan yang sudah memiliki legalitas usaha menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan dan sudah menyusun laporan keuangan. Pada umumnya beberapa UMKM sudah melakukan pencatatan maupun pembukuan untuk pengelolaan keuangan bisnis mereka, hanya bentuk dan tatanannya masih tergolong sangat sederhana.

## Analisis Data

Untuk menguji pengaruh kualitas laporan keuangan dan prospek implementasi SAK terhadap kemudahan akses modal menggunakan analisis MRA (*Moderated Regression Analysis*) yang merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (Imam Gozali, 2011).

Berdasarkan model penelitian yang telah dikemukakan pada bab II (dua) dimana terdapat interaksi maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model nilai selisih mutlak, sehingga persamaannya dapat dibuat sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3|X_1 - X_2| + e$$

Dimana:

Y = Kemudahan Akses modal

X1 = Kualitas laporan Keuangan

X2 = Prospek Implementasi SAK

$|X1-X2|$  = merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X1 dan X2

A = Koefisien *intercept*

$\beta_{1-5}$  = Koefisien regresi

$\varepsilon$  = *error term* faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan anggaran diluar variabel yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Umum Responden

Tabel dibawah ini menunjukkan karakteristik responden berdasarkan beberapa kriteria yang mendukung kelengkapan informasi dan pengolahan data.

**Tabel 1. Karakteristik Umum Responden**

Uraian	Jumlah responden	Persentase
<b>Lokasi Usaha</b>		
Kecamatan Kuningan	40	19%
Kecamatan Cigugur	4	2%
Kecamatan Kramatmulya	60	29%
Kecamatan Cilimus	6	3%
Kecamatan Kadugede	4	2%
Kecamatan Sindangsari	10	5%
Kecamatan Ciawigebang	16	8%
Kecamatan Garawangi	2	1%
Kecamatan Lebakwangi	2	1%
Kecamatan Luragung	2	1%
Kecamatan Cibeureum	2	1%
Kecamatan lainnya	58	28%
<b>Total Responden</b>	<b>206</b>	<b>100%</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	120	58%
Perempuan	86	42%
<b>Total Responden</b>	<b>206</b>	<b>100%</b>
<b>Jenis Usaha</b>		
Jual Beli ( Perdagangan)	144	70%
Industri ( manufaktur)	14	7%
Jasa	48	23%
<b>Total Responden</b>	<b>206</b>	<b>100%</b>
<b>Usia</b>		
Kuran 30 Tahun	74	36%
31-40 Tahun	50	24%
41-50 Tahun	50	24%
Lebih 50 Tahun	32	16%
<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

### Gambaran Kemudahan Akses Perbankan Untuk Permodalan (Jumlah Kredit yang Diterima)

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 56 UMKM belum pernah memperoleh kredit dari perbankan. Sedangkan pada rentang kurang dari 10.000.000 sebesar 22%,



9% untuk kisaran 10.000.000-25.000.000 dan 5% untuk kisaran pinjaman kredit sebesar 25.100.000–50.000.000 dari para pelaku UMKM terhadap pihak perbankan, serta hanya 8 % saja yang sudah memperoleh kredit dari bank diatas Rp 50.000.000

**Karakteristik Responden berdasarkan kriteria Kualitas Laporan Keuangan UMKM**

Berikut ini dapat digambarkan beberapa kriteria gambaran kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Kuningan.

**Tabel 2. Gambaran Kualitas laporan keuangan UMKM**

No	Uraian	Dalam % (persen)			
		Sangat Penting	Penting	Tidak Penting	Sangat Tidak Penting
1	Pelaku UMKM Melakukan Pembukuan	3	84	10	3
2	Terdapat Pegawai khusus yang bertanggungjawab melakukan pembukuan	8	31	59	2
3	Terdapat Software Akuntansi untuk mendukung pembukuan akuntansi	8	27	62	3
4	Pembukuan dilakukan secara rutin	13	55	30	2
5	Standar Akuntansi dibutuhkan untuk pembukuan	5	42	51	2

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

**Karakteristik Responden Berdasarkan Persepsi Pelaku Usaha UMKM tentang Pembukuan**

Dalam penelitian ini ingin mengetahui persepsi para pelaku UMKM tentang

pembukuan dengan empat kategori yaitu sangat penting dilakukan, penting dilakukan, tidak penting dilakukan dan sangat tidak penting dilakukan, seperti yang terangkum dalam tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Persepsi Pelaku Usaha UMKM tentang Pembukuan**

Persepsi Tentang Pembukuan	Jumlah responden	Persentase
Sangat penting Dilakukan	32	16%
Penting Dilakukan	128	62%
Tidak Penting Dilakukan	42	20%
Sangat Tidak Penting dilakukan	4	2
Total	206	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pemahaman terhadap SAK ETAP**

Dalam penelitian ini ingin mengetahui mengenai pemahaman para pelaku UMKM

terhadap SAK ETAP dengan empat kategori yaitu sangat paham, paham, tidak paham dan sangat tidak paham, seperti yang terangkum dalam tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK ETAP**

Pemahaman	Jumlah responden	Persentase
Sangat Paham	0	0%
Paham	8	4%
Tidak Paham	128	62%
Sangat Tidak Paham	70	34%
Total	206	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Kualitas Laporan Keuangan yang Dihasilkan Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Kuningan.**

Hasil pengolahan data menunjukkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan responden cukup bervariasi. Berdasarkan analisa berikutnya untuk variabel pemahaman SAK ETAP menunjukkan bahwa sebanyak 62% pelaku usaha tidak memahami SAK ETAP dan 34% mengaku sangat tidak paham mengenai SAK ETAP. Hal tersebut diperkirakan karena rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan SAK ETAP dengan ditunjukkan bahwa 84% responden menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima informasi atau sosialisasi mengenai penerapan SAK ETAP untuk pembukuan mereka dan hanya sebesar 10% yang mengaku pernah mendapatkan informasi sebanyak satu kali baik dalam kegiatan formal maupun informal. Sebanyak 4% pernah mengikuti dua kali.

#### **Kesiapan UMKM dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di Wilayah Kabupaten Kuningan**

Berdasarkan hasil kuesioner sekitar 74% responden menilai laporan keuangan sangat penting dalam perkembangan usaha dan 7% menyatakan sangat penting. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pengusaha UMKM memang telah menganggap bahwa pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka, serta menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan usahanya.

Manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan keahlian tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan dan lain-lain merupakan permasalahan utama dari UMKM (Basri & Nugroho, 2009). Proses pembukuan dan pelaporan keuangan telah menjadi perhatian bagi pengusaha UMKM untuk dapat mengatasi permasalahan kredit serta manajemen keuangan. Hal ini mungkin disebabkan karena mayoritas latar belakang pendidikan responden yang bukan berasal dari bidang akuntansi maupun ekonomi, sehingga tidak menganggap pembukuan penting dilakukan secara teratur.

#### **Ukuran Usaha, Lama Usaha Berdiri, Pemberian Sosialisasi dan Pelatihan SAK ETAP, Latar Belakang Pendidikan serta Jenjang Pendidikan Terakhir Dari Pemilik Berpengaruh terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait Pentingnya Proses Akuntansi pada UMKM**

Persepsi akan pentingnya pembukuan dan penyajian informasi keuangan didorong oleh tuntutan harus adanya laporan keuangan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika pengajuan kredit, untuk melakukan evaluasi usaha, serta menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan untuk ekspansi usaha. Hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil korelasi antar variabel. Variabel persepsi berhubungan kuat dengan pendidikan terakhir, ukuran usaha, dan pangsa pasar. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa variabel pendidikan terakhir, ukuran usaha, dan pangsa pasar akan berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terhadap pentingnya laporan keuangan UMKM.

### **Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait Pentingnya Proses Akuntansi pada UMKM**

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau probabilitas berada pada nilai 0,0170 lebih kecil dari 0,05, hal ini menyebabkan hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku usaha.

### **Pengaruh Lama Usaha terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait Pentingnya Proses Akuntansi Pada UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,082 lebih besar dari nilai 0,05, artinya variabel lama usaha berdiri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM.

### **Pengaruh Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait Pentingnya Proses Akuntansi pada UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai 0,05, artinya sosialisasi dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM.

### **Pengaruh Pendidikan Terakhir terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait Pentingnya Proses Akuntansi pada UMKM**

Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terakhir berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM di Kabupaten Kuningan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan pelaku usaha memandang bahwa pembukuan dengan akuntansi perlu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan usaha mereka.

### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Persepsi Pelaku Usaha terkait**

### **Pentingnya Proses Akuntansi pada UMKM**

Hasil penelitian menunjukkan angka bahwa nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis nol diterima artinya bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM. Hal ini bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan diawal. Meskipun latar belakang pendidikan mereka beragam namun pada umumnya mereka menganggap bahwa sebenarnya proses pembukuan menurut akuntansi itu perlu dilakukan untuk ketertiban administrasi pembukuan usaha mereka.

### **Ukuran Usaha, Lama Usaha Berdiri, Pemberian Informasi dan Sosialisasi SAK-ETAP, Latar Belakang dan Jenjang Pendidikan Terakhir Pelaku Usaha, serta Profesionalisme Manajemen Berpengaruh terhadap Pemahaman Pelaku UMKM Terkait Implementasi SAK ETAP**

Hubungan antar variabel lainnya juga dapat dilihat pada pengujian korelasi yang ditunjukkan pada tabel berikutnya. Pada pengujian ini, pemahaman responden mengenai SAK ETAP, berhubungan kuat dengan informasi yang dilakukan, pendidikan terakhir, ukuran usaha, dan besarnya omset perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel Informasi dan sosialisasi, pendidikan terakhir, ukuran usaha, dan besarnya omset berpengaruh terhadap pemahaman responden mengenai SAK ETAP.

### **Pengaruh Ukuran Usaha terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Hasil penelitian diperoleh nilai signifikan atau probabilitas sebesar 0,212 lebih dari 0,05, hal ini memberi gambaran bahwa variabel ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP.

### **Pengaruh Lama Usaha terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Dari hasil pengolahan data statistik yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan atau probabilitas sebesar 0,263 lebih dari 0,05, artinya variabel lama usaha berdiri tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP, sehingga hipotesis alternatif tidak diterima.

### **Pengaruh Tingkat Informasi dan Sosialisasi yang Diterima terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat informasi dan sosialisai berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP, yang berarti hipotesis alternatif diterima.

Pelatihan teknik dasar dalam melakukan pembukuan akuntansi yang perlu diberikan adalah bagaimana melakukan penatausahaan bukti transaksi (yang terdiri dari faktur, kuitansi, bon, dan lain-lain). Kemudian sosialisasi mengenai pengelolaan catatan jurnal harian dan pengelolaan siklus akuntansi hingga menyusun laporan keuangan. Pengusaha UMKM berpendapat bahwa masih sangat perlu adanya sosialisasi terkait SAK ETAP karena sebanyak 74% responden menjawab belum pernah mendapat sosialisasi, sehingga sangat penting sosialisasi untuk penggunaan SAK ETAP yang lebih baik dan tepat sasaran lagi dalam upaya membantu UMKM mencatat dengan baik semua transaksi keuangan dan membuka peluang dalam kapasitas mereka sebagai wajib pajak melaporkan posisi keuangan dan laporan laba rugi dengan lebih memadai untuk perhitungan pajak, sehingga ada potensi bertambahnya penerimaan negara dari potensi pajak penghasilan dari sektor UMKM.

Metode sosialisasi yang diharapkan oleh para pengusaha UMKM terkait SAK ETAP ini adalah dengan cara pelatihan yang berkelanjutan dengan pemberian modul praktek kepada para pengusaha. Menurut mereka cara ini dapat lebih langsung

dipraktekkan pada usaha mereka. Sosialisasi atau pelatihan akuntansi atau pelatihan yang selama ini dilakukan hanya berupa seminar untuk menyampaikan gambaran teori belum secara teknis ke praktek pelaporan, untuk pihak yang dinilai paling bertanggung jawab untuk pelaksanaan sosialisasi ini adalah Kementerian Koperasi dan UMKM, sebab menurut responden pihak tersebut yang paling mengerti kondisi UMKM saat ini, mulai dari kondisi geografis, latar belakang pengusaha, jenis usaha serta kelompok usaha yang ada sehingga dimungkinkan pelatihan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM.

### **Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,203 lebih besar dari 0,05, artinya latar belakang pendidikan (LB) tidak berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusaha terkait SAK ETAP, yang berarti hipotesis alternatif ditolak.

### **Pengaruh Pendidikan Terakhir terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir berpengaruh terhadap besarnya pemahaman pengusaha mengenai SAK ETAP.

Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif diterima. Variabel pendidikan terakhir (PT) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman pelaku usaha UMKM mengenai SAK ETAP. Hal ini memungkinkan terjadi karena pendidikan seseorang menyebabkan kemudahan daya tangkap atas suatu hal baru yang diterima. Pelaku usaha dengan jenjang pendidikan lebih tinggi lebih mudah memahami hal baru dibanding pelaku usaha dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

### **Pengaruh Besarnya Profesionalisme Manajemen terhadap Besarnya Pemahaman Pengusaha terkait SAK ETAP**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05, ini membuktikan bahwa variabel profesional manajemen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya pemahaman pengusaha mengenai SAK ETAP.

### **Dampak dari Implementasi SAK-ETAP pada Kualitas Laporan Keuangan serta Pengaruhnya pada Tingkat Permodalan yang Diperoleh Para Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Kuningan**

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,011 kurang dari 0,05, membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya kredit yang diterima pelaku usaha UMKM saat mengajukan kredit ke pihak bank, maka hipotesis 2 diterima.

Hasil pengujian model kualitas laporan keuangan UMKM berpengaruh signifikan terhadap besaran kredit yang diterimanya. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya kredit yang diterima, hal ini terjadi karena adanya kemungkinan bahwa laporan keuangan UMKM belum dapat menjadi sumber informasi yang andal dan relevan bagi perbankan. Laporan keuangan yang disajikan oleh pelaku usaha UMKM merupakan satu persyaratan administrasi yang harus disediakan pada saat proses pengajuan kredit ke perbankan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK ETAP bervariasi. Melihat kondisi ini maka

kami menyimpulkan bahwa UMKM di Kabupaten Kuningan belum siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami SAK ETAP. Sosialisasi dari pihak yang berkepentingan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman. Lebih baik lagi kalau diberikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Implementasi SAK ETAP akan mempunyai peluang untuk diimplementasikan. Dengan demikian, pelaporan keuangan dan pembukuan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan usaha UMKM, sehingga jika mereka telah memahami SAK ETAP mereka mau mengimplementasikan SAK ETAP karena mereka menganggap pentingnya melakukan pelaporan keuangan dengan berdasarkan SAK ETAP. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Kuningan menunjukkan cukup bervariasi.

Berdasarkan data yang dianalisis dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pengusaha UMKM memang telah menganggap bahwa pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha mereka, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan usahanya, dan mempunyai peluang untuk menerapkan standar ETAP.

Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan serta jenjang pendidikan terakhir dari pemilik berpengaruh terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM.

Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP.

Dampak dari implementasi SAK ETAP pada kualitas laporan keuangan serta pengaruhnya pada tingkat permodalan menunjukkan variabel besarnya Jumlah Kredit (CA), berhubungan kuat dengan Kualitas Laporan Keuangan UMKM (KW), sehingga hal tersebut juga memberikan indikasi kuat bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap besarnya kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alhusain, Achmad Sani. (2014). Analisa Kebijakan Permodalan dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Bali dan Sulawesi Utara). *Kajian* Vol 14 No.4.
- Baas, Timo & Mechthild Schrooten. (2006). Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economic* Vol. 27.
- Basri, Y.Z & M. Nugroho. (2009). Ekonomi Kerakyatan: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Cziraky, D., S. Tisma & A. Pisarovic. (2005). Determinants of the Low SME Loan Approval Rate in Croatia : A Latent Variable Structural Equation Approach. Mimeo Press, Zagreb.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Semarang: Universitas Diponegoro
- Murniati. (2002). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Narsa, I Made *et al.* (2012). Mengungkap Kesiapan UMKM dalam Implementasi SAK ETAP untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi* Tahun XXII No 3 2012.
- Pinasti, Margani. (2001). Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* No.1 Vol 3.
- Probosari, Devi. (2014). Praktik Akuntansi & Implikasinya pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi pada UMKM). Skripsi.
- Rudiantoro, Rizki & Sylvia Veronica Siregar. (2011). Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Effendi. (1995). Metode Penelitian Survei Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
- Tuti, Rias & S. Patricia Febrina Dwijayanti. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 "Towards New Indonesia Business Architecture Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015"* Fakultas Bisnis dan Pascasarjana UKWMS.
- Warren., *et.al.* (2014). Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia) Edisi 25. Salemba Empat. Jakarta